



Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso

Serlina Markus¹, Tabita R. Matana², Sudarto Usuli³
^{1,2,3}Universitas Sintuwu Maroso Poso

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan pemerintah desa Toinasa didasarkan pada Rasio kemandirian, Rasio efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data Laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) periode tahun 2020-2024. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat pada periode tahun 2020-2024 pada Rasio kemandirian rata-rata 0,68% dengan kriteria sangat rendah. Rasio efektivitas rata-rata 52,87% dengan kriteria tidak efektif. Rasio Efisiensi rata-rata 94,94% dengan kriteria kurang efisien. Rasio belanja operasi rata-rata 39,05% dengan kriteria baik. Rasio belanja modal rata-rata 29,37% dengan kriteria cukup baik. Rasio pertumbuhan 17,65% dengan kriteria rendah.

Kata Kunci: kinerja keuangan.



AFILIASI:

Jurusan Manajemen, Fakultas
Ekonomi Universitas Sintuwu
maroso, Poso, Sulawesi Tengah
Indonesia

EMAIL KORESPONDENSI:

tabita@unsimar.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL:

Diterima:

1 Desember 2025

Direvisi:

10 Desember 2025

Disetujui:

15 Desember 2025

Pendahuluan

Sistem pemerintahan desa di pimpin oleh seorang kepala desa yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola berbagai aspek pemerintahan di wilayahnya. Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah desa untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat desa. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus disertai dengan pertanggung jawaban kepada masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan dana desa, yang harus transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Struktur pemerintahan desa mencakup dua komponen utama, yaitu pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa sendiri terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa mencakup berbagai posisi, seperti sekretaris desa dan pelaksanaan kewilayahan yang berperan mendukung tugas-tugas administratif dan operasional demi kelancaran pemerintahan di tingkat desa. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara berbagai elemen dalam pemerintah desa untuk mewujudkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.



Desa Toinasa terletak di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Desa ini memiliki potensi alam yang kaya termasuk sumber daya pertanian dan pariwisata yang menjadi mata pencaharian utama masyarakatnya. Desa Toinasa juga memiliki pendapatan asli desa yang di kelola melalui BUMDes, yaitu agen gas dan penyewaan tenda dan kursi yang akan menambah penghasilan desa tersebut selain pendapatan asli desa, selain itu desa Toinasa juga mendapatkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat melalui APBN. Dana desa tersebut di kelola oleh pemerintah desa Toinasa untuk kebutuhan masyarakat seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan prasarana jalan (gorong-gorong, parit dan drainase). Desa Toinasa berupaya untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) secara partisipatif, melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaannya, demi tercapainya desa yang sejahtera. Dalam sistem pemerintahan desa Toinasa terdiri dari 1 kepala desa, 12 pegawai tetap dan 1 pegawai honorer.

Tata kelola keuangan pemerintah desa yang baik di tingkat desa dapat dilihat dari dua aspek utama yaitu pertanggung jawaban dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, pembanguna yang dilaksanakan harus berkualitas tinggi dan memberikan dampak positif nyata bagi kehidupan masyarakat. Desa Toinasa memiliki kewenangan penuh untuk mengelola keuangan sendiri secara mandiri, yang dibarengi tanggung jawab besar untuk menciptakan APBDes yang transparan dan akuntabel (Idris, 2022). Penyusunan APBDes menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan desa karena dokumen ini tidak hanya akan mencerminkan alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan tetapi juga akan menjadi alat untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan program yang dilaksanakan. Pemerintah desa berkewajiban mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang dilaksanakan, terutama yang berdasarkan intruksi pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana berdasarkan perkalian antara jumlah desa setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di alokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan seta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota yang bersangkutan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di hitung dengan bobot: 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota; 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota; dan 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota (Lembaran & Republik, 2014). Dana desa ini tidak boleh di gunakan untuk kepentingan pribadi.

Pembahasan

Perencanaan keuangan, pengendalian pengeluaran, dan pengambilan keputusan keuangan adalah tiga komponen penting dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Perencanaan keuangan adalah membuat tujuan keuangan jangka panjang suatu perusahaan dan rencana untuk mencapainya. Manajemen keuangan mencakup pengelolaan anggaran, pengelolaan risiko, dan pengendalian biaya. Di sisi lain,

pengambilan keputusan keuangan melibatkan memilih proyek investasi yang tepat, sumber pendanaan yang tepat, dan strategi keuangan yang tepat (Suriyanti et al., 2023).

Laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan yang disusun untuk disampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Laporan ini dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang berisi informasi penting terkait kondisi keuangan suatu entitas atau organisasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan, baik itu strategi, investasi, maupun kebijakan lainnya yang berhubungan dengan keuangan (Triyuwono, 2019).

Kinerja keuangan pemerintah desa merupakan serangkaian tata cara atau prosedur yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas terkait pengelolaan keuangan desa, seperti pencacatan, pengukuran, evaluasi, dan pencapaian tujuan, dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Melalui kinerja keuangan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, pemerintah desa dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi (Pangaribuan & Sirait, 2023). Dengan kinerja keuangan yang optimal di harapkan mampu mengurangi resiko penyimpangan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan tata kelola desa yang berpusat pada hasil. Dengan demikian, prosedur yang baik dalam pelaksanaan kinerja keuangan tidak hanya berdampak pada keberhasilan pengelolaan dana desa, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih produktif, untuk mengukur seberapa efektif kinerja keuangan desa perlu menggunakan rasio keuangan.

Rasio kemandirian merupakan faktor penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana desa mampu membiayai kebutuhannya secara mandiri tanpa bergantung pada sumber bantuan dari pihak luar desa, seperti pemerintah pusat, provinsi, atau pihak lain. Rasio ini mencerminkan tingkat ketergantungan keuangan desa terhadap bantuan eksternal dalam mendanai berbagai program pembangunan maupun operasional pemerintahan desa (Pangaribuan & Sirait, 2023). Semakin tinggi nilai rasio kemandirian maka semakin kecil tingkat ketergantungan desa pada bantuan dana dari luar, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu menggali potensi yang ada di desa mereka serta memanfaatkan sumber daya lokal seperti pendapatan asli desa dengan baik. Rasio kemandirian maka di perlukan rumus (Anugeraheni & Yuniarta, 2022).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli}}{\text{pendapatan transfer}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah atau desa mampu merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) atau pendapatan asli desa (PADes) sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Rasio ini membandingkan pendapatan yang berhasil direalisasikan dengan potensi pendapatan rill yang dimiliki oleh desa, berdasarkan sumber daya dan peluang yang ada. rasio efektivitas maka digunakan rumus (Anugeraheni & Yuniarta, 2022):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah/Desa}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah/Desa}} \times 100\%$$

asio efisisensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan sumber daya yang ada. Semakin kecil rasio efisiensi, semakin baik kinerja keuangan, karena menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Sebaliknya, rasio efisiensi yang tinggi dapat mengindikasikan adanya pemborosan atau ketidakefisien dalam penggunaan sumber daya. Rasio Efisiensi (Anugeraheni & Yuniarta, 2022):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah/Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah/Desa}} \times 100$$

knik yang digunakan dalam pengambilan data adalah wawancara dan Dokumentasi data secara langsung, yakni laporan Realisasi APBDesa pada pemerintahan desa Toinasa tahun 2020-2024. Data yang terkumpul di analisis secara deskriptif. Melalui analisis ini, pemerintah desa dapat mengidentifikasi kelemahan dan potensi sumber pendapatan lokal yang bisa dikembangkan, sehingga dapat mendorong perencanaan keuangan yang lebih berkelanjutan, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat otonomi desa dalam pengambilan keputusan anggaran

Hasil

Secara keseluruhan rasio kemandirian pemerintah desa Toinasa rata-rata 0,68% dengan kriteria sangat rendah. dapat disimpulkan bahwa Desa Toinasa masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dan belum memiliki sumber pendapatan asli yang stabil, nampak pada tabel 1

Tabel 1 Rasio Kemandirian

Tahun	Pendapatan asli desa (Rp)	Pendapatan trasfer (Rp)	Rasio kemandirian keuangan (%)	kriteria
2020	0	1.417.034.891,00	0%	Sangat rendah
2021	0	1.692.226.468,00	0%	Sangat rendah
2022	14.592.922,00	922.434.704,00	1,58%	Sangat rendah
2023	12.917.292,00	1.400.950.212,00	0,94%	Sangat rendah
2024	13.018.000,00	1.372.956.139,00	0,92%	Sangat rendah
Rata-rata			0,68%	Sangat rendah

Sumber: data diolah 2025

Rasio efektivitas dana desa pada desa Toinasa kecamatan Pamona Barat merupakan faktor penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah atau desa mampu merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) atau pendapatan asli desa (PADes) sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nampak pada tabel 2

Tabel 2 Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Desa (Rp)	Anggaran Pendapatan Asli Desa (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2020	0	0	0%	Tidak efektif
2021	0	0	0%	Tidak efektif
2022	14.592.922,00	22.488.000,00	64,89%	Kurang efektif
2023	12.917.292,00	12.981.000,00	99,50%	Efektif
2024	13.018.000,00	13.018.000,00	100%	Sangat efektif
Rata-rata			52,88%	Tidak efektif

Sumber: data diolah 2025

Rasio efisiensi dana desa Toinasa kecamatan Pamona Barat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan sumber daya dalam suatu organisasi dalam hal ini APBdes, Nampak pada tabel 3

Tabel 3 Rasio Efisiensi

Tahun	Total Realisasi Belanja Desa (Rp)	Total Realisasi Pendapatan Desa (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2020	1.391.913.136,00	1.420.246.211,00	98,0%	Kurang efisien
2021	1.407.423.109,00	1.716.539.402,07	81,99%	Cukup efisien
2022	978.105.270,00	937.027.626,00	104,38%	Tidak efisien
2023	1.413.439.053,00	1.435.873.431,00	98,43%	Kurang efisien
2024	1.300.096.840,00	1.413.988.041,00	91,94%	Kurang efisien
Rata-rata			94,94%	Kurang efisien

Sumber: data diolah 2025

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja keuangan pemerintah desa Toinasa dari segi rasio kemandirian menunjukkan rata-rata 0,68% dengan kriteria sangat rendah. dapat disimpulkan bahwa desa Toinasa masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dan belum memiliki sumber pendapatan asli yang stabil.
2. Kinerja keuangan pemerintah desa Toinasa kecamatan Pamona Barat di lihat dari segi rasio efektivitas rata-rata 52,87% dengan kriteria tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa desa Toinasa belum mampu menghasilkan pendapatan bagi desa dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.
3. Kinerja keuangan pemerintah desa Toinasa dari segi rata-rata rasio efisiensi belanja desa sebesar 94,94% dengan kriteria "Kurang Efisien". Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, pengeluaran yang dilakukan oleh desa untuk

mendukung kegiatan dan pelayanan masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan total pendapatan yang diterima.

Daftar Pustaka

- Anugeraheni, N. K. D., & Yuniarta, G. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 426–437.
- Febriano, M. R., & 1, Ety Gurendrawati 2, H. K. 3. (2024). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DESA. 5(2), 454–472.
- Idris, H. (2022). Menilai Kinerja Laporan Keuangan Desa dengan Analisis Rasio Keuangan (Studi Literatur). 3(1), 36–50.
- Lembaran, T., & Republik, N. (2014). www.bphn.go.id.
- Mariani, D. I., Hartono, A., & Ulfah, I. F. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Periode 2020-2022. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(2), 185–196. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending/article/view/2294>
- Pangaribuan, J., & Sirait, J. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pada Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 274–286. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2984>
- Regency, P., Santhi, A., & Rahma, R. (2023). LEMBANG MESAKADA KABUPATEN PINRANG Analysis Of Financial Performance Of Lembang Mesakada Village Government ,. 3(November 2023), 210–217.
- Suriyanti, Rahmansah, A. A., & Ramlawati. (2023). Analisis Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Sikkuale Kabupaten Pinrang. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 235–246.
- Triyuwono, E. (2019). Laporan Keuangan Desa : Sebuah Tinjauan.
- USULI, S. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Profitabilitas Pada Mutiara Bandung Optik Poso. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 19(1), 48–56.